

"Menggoreng" Opini dengan Spanduk

Oleh : Lukas S. Ispandriarno

PASCA pengumuman tim investigasi TNI AD, opini publik berubah cepat dari mengkritisi penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan ke arah dukungan. Pernyataan pejabat militer diiringi gerakan sejumlah massa memasang spanduk di Surakarta, serta demo di Yogyakarta dan Jakarta. Harian *Bernas Jogja* (13/4/2013) menampilkan foto *headline*, menunjukkan dua laki-laki berbau loreng, bertopi dan memegang poster bertuliskan: Sejuta Preman Mati Masyarakat Jakarta Tidak Peduli!!! Tulisan di bawahnya berbunyi: Kasus Cebongan Bukan Pelanggaran HAM, Murni Kasus Balas Dendam dan Semangat Jiwa Korsa Kopassus "Karena Bukan Operasi Militer".

Opini publik

Media massa lokal Yogyakarta berebut mengusung berita heboh. Judul berita dengan huruf besar dan tebal disertai foto menjadi daya pikat agen, loper, penjaja dan pembaca koran. Media menjadi saluran ekspresi berbagai kalangan, namun yang terlihat luar biasa adalah pendapat sekelompok orang, organisasi, dan beberapa pejabat yang menyerukan pesan-pesan "heroik" seperti contoh di atas. Gerakan spanduk ini jauh lebih seru ketimbang kampanye pemilihan kepala daerah. Media massa menjadi alat "penggoreng" opini publik. Semakin lama digoreng semakin matang tapi bila terlalu lama, gosong.

Gorengan opini publik tidak hanya di media massa cetak, tetapi juga media elektronik daring (dalam jaringan-online), berupa SMS, juga pesan di media sosial, facebook, twitter. Bentuknya berwujud tanggapan balik di media daring dari berbagai kalangan, warga beridentitas, banyak yang anonim, atau dengan identitas buatan. Sebagian pesan yang diebarkan sejalan dengan komentar presiden, anggota parlemen, pejabat pemerintah, sipil dan terutama militer.

Pernyataan terbaru disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ketika berada di Bantul, DIY. "Karena sudah jelas, berdasarkan keterangan tim penyelidikan TNI AD, penyerangan di Lapas Cebongan terjadi karena tergugah jiwa korsan dan sekali lagi tidak ada komando bahkan perintah dari atasan." (*Bernas Jogja*, 13/4/hlm. 6). Begitulah

opini digelorkan pihak tertentu untuk memengaruhi masyarakat.

Opini dapat diterjemahkan sebagai "pendapat" atau "sikap" namun menurut Klaus Krippendorff (2005) secara etimologi kata "opini" memiliki dua pengertian. *Satu*, ide yang lahir dari pikiran seseorang berkait kemauan berpikir secara independen untuk memilih (menyepakati) pikiran orang lain. *Kedua*, memiliki pilihan, dapat menentukan sesuatu atau mengambil satu posisi atas sejumlah isu kontroversial.

Memiliki opini mengimplikasikan seseorang berada dalam posisi otonom secara kognitif, independen, tetapi tak dapat diprediksi. Kata *public* masih kata Krippendorff, berasal dari bahasa Latin (kata benda) yang berarti "orang" dan sebagai kata sifat artinya "dapat diakses oleh semua" (*accessible to all*), bukan larangan bagi penggunaan privat. Maka opini lahir dari pikiran bebas seseorang karena kemampuan pengetahuannya.

Seseorang bisa beropini artinya ia bisa memilih satu dari sejumlah isu yang menimbulkan silang pendapat. Dalam praktik, beropini tidak mudah dilakukan karena mengandaikan syarat otonomi atau kemandirian dalam penge-tahuan, misalnya pengetahuan tentang "preman" atau "pelanggaran HAM". Syarat lain adalah independensi atau kemerdekaan seseorang dalam melahirkan opini. Tentu saja dalam kehidupan (politik) ada pihak-pihak, seperti pemerintah, pimpinan institusi, tokoh masyarakat (*opinion leader*), yang dapat memengaruhi opini seseorang. Dengan demikian opini bisa direkasaya, diatur, digerakkan meski sejatinya ia lahir dari sebuah independensi.

Mekannal pesan opini

Kata-kata "sejuta preman mati rakyat tidak rugi" di Jalan Magelang atau "sejuta preman mati masyarakat Jakarta tidak peduli" di Jakarta menunjukkan penggagas opini adalah individu atau institusi yang sama. Ini jauh dari sifat alamiah



FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ATMAJAYA
YOGYAKARTA

seperti disampaikan sejumlah pejabat pemerintah. Singkatnya, opini ini merupakan hasil pengolahan, disiapkan, digerakkan, bukan spontan. Bagaimana memaknai pesan-pesannya?

Kita bisa mengupasnya secara etimologi, kata *demi*, kata, misalnya apa arti "preman". Sejumlah kepustakaan menyebut kata ini berasal dari Belanda, *vrijman* yang artinya orang bebas, merdeka. Poerwadarminta (1986) dalam kamusnya yang terkenal bagi kaum terpelajar membeber sejumlah arti: partikelir, bukan tentara; kepunyaan sendiri. Secara kontekstual, menguiti sejarahnya, kata ini tentu muncul karena kondisi zaman penjajahan, orang yang merdeka adalah orang sipil. Dalam zaman sekarang, kata *preman* semakin luas artinya, tapi pada umumnya dimaknai sebagai "orang yang melakukan kejahatan" sehingga jumlahnya tidak hanya seribu atau sejuta. Mereka juga bukan hanya pemalak di pasar becek, terminal atau cafe, tetapi juga penjahat di kantor swasta, kantor pemerintah, institusi kepolisian dan kemiliteran, di kementerian, juga di lembaga legislatif dan yudikatif.

Preman juga tidak hanya melekat pada kelompok masyarakat tertentu seperti yang diopiniikan belakangan ini. Pengamat kebudayaan Betawi, Yahya Andi Saputra, menyebut beberapa preman ternama seperti Si Conet, Angkri, Si Pitung, Entong Gendut, dan Kai'in bin Kayah (*Tempo.co*, 17/3). Dikatakan bahwa di masa itu preman hadir untuk menolong rakyat miskin. Bagi masyarakat Betawi merdeka adalah pahlawan, ada rasa kebangsaan saat mereka rampok, sebaliknya di mata Belanda. *Pitung dan kawan-kawan adalah pembuat rusuh.*

Dengan mengupas satu kata saja kita sudah menemukan persoalan atau keganjilan dari pesan yang ada di sejumlah spanduk dan dikutip media massa. Apakah, si penggagas opini "sejuta preman mati rakyat tidak rugi" sudah memikirkan hal ini? Kata berikut yang dapat kita

kupas adalah "mati" yang bisa dimaknai dalam konteks penyerangan LP Cebongan, "diambak" atau "diberondong dengan senjata otomatis". Mati artinya "dibunuh". Pertanyaannya, benarkah gerakan ini akan mengajak warga masyarakat Yogyakarta, Surakarta, Jakarta untuk menyeretui dan atau membunuh penjahat? Berapa juta penjahat akan dibunuh? Benarkah masyarakat tidak rugi?

Kalau dibungkan dengan hak-hak asasi manusia tentu persoalan akan semakin pelik, membutuhkan pengetahuan tertentu, dan tidak semua dari kita paham soal ini. Maka di sinilah bahayanya menggoreng opini seperti ini. Masyarakat yang tidak paham diajak atau "dipaksa" untuk menyepakati sebuah pendapat yang bila dipraktikkan akan berakibat sangat fatal. Masyarakat diajak menyetujui sebuah aksi pembunuhan nyata penjahat atau preman. Lalu di mana hukum, di mana negara, di mana pemimpin, di mana nilai manusia?

Peran media

Dengan kemerdekaan yang dimilikinya, media memiliki peran besar dalam menyebarkan opini publik. Media dituntut untuk bersikap kritis dan etis, tidak sekadar menjual berita atau informasi yang panas. Para awak media, reporter, jurnalis, editor, radaktur senior mesti menempatkan dirinya sebagai kaum terpelajar yang tidak larut dengan hiruk-pikuk yang menyentak. Tentu saja para pemilih media juga menghitungkan bagaimana isu-isu yang diujal oleh perusahaan medianya tidak sekadar menarik bagi pembaca dan pengiklan namun juga memberikan pencerahan.

Para pemimpin di provinsi dan kota perlu bersikap dengan cerdas menyikapi gerakan spanduk ini. Secara mudah bisa dipertanyakan, apakah pemasangan spanduk sudah melalui izin, termasuk membayar pajak? Apakah spanduk-spanduk ini diperlakukan seperti spanduk lain yang bila melanggar dicopot oleh Satuan Polisi Pamong Praja? "Menggoreng" opini publik dengan spanduk bukanlah aksi yang cerdas. ***

Lukas S. Ispandriarno, Dekan FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Ketua Masyarakat Peduli Media (MPM) DIY.